

**INSTRUMEN PENGUKURAN PENGENTASAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI DALAM  
PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN MENGGUNAKAN METODE DELPHI**

*MULTIDIMENSIONAL POVERTY ALLEVIATION MEASURING INSTRUMENT IN A CITIZENSHIP  
PERSPECTIVE USING THE DELPHI METHOD*

**Rian Pramana Suwanda\*, Bagong Suyanto, Suparto Wijoyo**  
Universitas Airlangga  
Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 47 Surabaya 60132, Indonesia

**Atif Rao**  
COMSATS University Islamabad  
Hostel City Line 12 Islamabad 45550, Pakistan

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 08 Juni 2024

Disetujui : 13 Juli 2024

**Keywords:**

multidimensional poverty; citizenship  
mechanism; Delphi method

**Kata Kunci:**

kemiskinan multidimensi; mekanisme  
kewarganegaraan; metode Delphi

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [rian.pramana.suwanda-2020@pasca.unair.ac.id](mailto:rian.pramana.suwanda-2020@pasca.unair.ac.id)

**Abstract:** this study aims to analyze multidimensional poverty alleviation through citizenship mechanisms as well as instruments to measure the effectiveness of citizenship mechanisms in multidimensional poverty alleviation. This study uses the Delphi method which is carried out through the exploration, distillation, and utilization stages. Multidimensional poverty alleviation can be done through a citizenship mechanism that can guarantee equal rights and opportunities for every individual to obtain jobs, income, education, and other public services. The instrument to measure the effectiveness of the citizenship mechanism in multidimensional poverty alleviation is based on 3 indicators described in 22 sub-indicators. Indicators of the effectiveness of the citizenship mechanism in alleviating multidimensional poverty are the fulfillment of the legal identity of citizenship as the key to access to state resources, the protection of migrant citizens, and affirmation policies for children, the elderly, people with disabilities, and other vulnerable groups.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengentasan kemiskinan multidimensi melalui mekanisme kewarganegaraan serta instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi. Kajian ini menggunakan metode Delphi yang dilaksanakan melalui tahap eksplorasi, distilasi, dan utilisasi. Pengentasan kemiskinan multidimensi dapat dilakukan melalui mekanisme kewarganegaraan yang dapat menjamin hak serta kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi didasarkan pada 3 indikator yang dijabarkan dalam 22 butir sub indikator. Indikator efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi yaitu pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara, perlindungan warga negara migran, serta kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi isu global sebagaimana termuat dalam *The 2030 Agenda for Sustainable Development* dengan goals pertama konsensus yaitu *end poverty in all its forms everywhere*. Kemiskinan merupakan permasalahan klasik di berbagai belahan dunia yang perlu diselesaikan secara kritis untuk mewujudkan kesejahteraan (Cerio, dkk., 2019; Suwanda, 2020). Pengukuran kemiskinan oleh Bank Dunia mendapatkan kritik dari berbagai ahli terutama bagi negara yang melakukan pengukuran kemiskinan hanya berdasar pada pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Ambang kemiskinan resmi yang dirancang pada tahun 1960-an masih mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam mengukur dan menganalisis tingkat kemiskinan yang secara khusus berfokus pada tingkat pendapatan yang diperlukan untuk bertahan hidup (Wagle, 2008). Garis kemiskinan dengan manifestasinya belum menyediakan sarana yang memadai untuk mempertahankan kehidupan minimum (Glennester, 2002). Paradigma pengentasan kemiskinan yang diupayakan oleh berbagai negara mendapatkan kritik dari para pakar.

Kritik terhadap paradigma kemiskinan semakin menguat dengan bergesernya paradigma kemiskinan yang semula kemiskinan fisiologis menuju kemiskinan multidimensi. Paradigma kemiskinan fisiologis masih bertahan hingga saat ini dan digunakan di berbagai belahan dunia (Booth, 1902; Rowntree, 1908). Pandangan ini seiring berjalannya waktu berkembang menjadi pendekatan kebutuhan dasar (Streeten, 1981). Studi yang dilakukan pada tahun 1970-an menghasilkan pendekatan kemiskinan multidimensional berbasis pendekatan kemampuan yang menggabungkan kerentanan, ketidaksetaraan, dan hak asasi manusia sehingga konsep kemiskinan telah diperluas dari model fisiologis ke model sosial (Sen, 1976; Sen, 1979; Sen, 1981). Konsep ini menjadi *leverage point* dalam perkembangan studi kemiskinan multidimensi. Konsep kemiskinan berkembang dalam pendekatan deprivasi sosial yang memandang kemiskinan sebagai penolakan terhadap kesempatan dan pilihan yang paling mendasar bagi perkembangan manusia (Townsend, 1979). Perkembangan selanjutnya merujuk pada eksklusi sosial yang menegaskan adanya keterbatasan sumber daya, hak, barang, dan jasa serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi

dalam hubungan ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Kemiskinan partisipatoris merupakan pendekatan kemiskinan yang menitikberatkan pada deprivasi (Chamber, 1995; Chamber, 1997). Paradigma kemiskinan multidimensi adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia yang termuat dalam dokumen *Poverty Reduction and Human Rights*.

Paradigma kemiskinan multidimensi telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pergeseran paradigma kemiskinan multidimensi yang sebelumnya terbatas pada diskusi akademik, latihan, dan publikasi saat ini telah mencapai konsensus metodologi (Wagle, 2008). Indeks kemiskinan multidimensi telah diterima oleh para studi dan digunakan oleh berbagai negara (Sen, 1976; Alkire dan Foster, 2011). Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian negara sebenarnya telah memiliki indeks kemiskinan multidimensi nasional namun hanya sedikit yang menggunakannya sebagai alat kebijakan formal (Hlasny, Asadullah, & Sabra, 2022). Kemiskinan multidimensi sering diabaikan pada tahap perumusan kebijakan terutama di negara-negara berkembang karena prioritas lokal yang berbeda (Chowdhury dan Mukhopadhaya, 2014). Perkembangan kemiskinan multidimensi secara institusional masih diabaikan oleh beberapa negara dalam pengambilan keputusan.

Kemiskinan multidimensi pada dasarnya dapat teratasi apabila terdapat keberpihakan negara. Negara menjadi aktor yang memberikan fasilitas bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam mengelola sumber daya (Narayan, dkk., 2000; Chambers, 1983). Pemerintah harus mampu mengembangkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan setiap individu untuk keluar dari kemiskinan (Anand dan Sen, 1997). Rancangan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan multidimensi sangat dibutuhkan (Alkire dan Santos, 2014). Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender secara komprehensif menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan (Kabeer, 2015). Kebijakan pemerintah merupakan kunci utama dalam mengatasi eksklusi sosial dan mempromosikan inklusi sosial (Narayan dan Petesch, 2016). Negara memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi.

Negara memiliki tatanan administratif dan hukum yang dapat diubah secara legislasi untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama masalah kemiskinan. Negara sebagai asosiasi politik berwenang dalam melaksanakan segala upaya untuk mewujudkan kesejahteraan (Weber, 1946). Sistem negara menuntun otoritas yang mengikat atau *binding authority*, tidak hanya atas warga negara tetapi semua aktivitas yang terjadi di wilayah yurisdiksi negara (Deutsch, 1986; Pierson, 1996). Peran negara dalam konteks pengentasan kemiskinan multidimensi dimanifestasikan dalam bentuk implementasi mekanisme yang khas dimiliki oleh suatu negara. Mekanisme yang dimaksud diantaranya yaitu *control of the means of violence, territoriality, sovereignty, constitutionality, impersonal power, the public bureaucracy, authority/legitimacy, citizenship, dan taxation*.

Kewarganegaraan menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kewarganegaraan adalah gagasan tentang hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara (Pierson, 1996). Kewarganegaraan dalam perspektif sosiologis memandang bahwa semua anggota komunitas politik diberi wewenang untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan prinsip nilai moral yang sama (Haugaard, 2017). Kewarganegaraan merupakan pengalihan kedaulatan dari raja ke warga negara sehingga memungkinkan setiap orang untuk memiliki hak kewarganegaraan. Kewarganegaraan menjadi sarana untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi, dan politik. Kewarganegaraan merupakan faktor penting untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem dunia saat ini (Pierson, 1996; Blitz dan Lynch, 2009; Kingston, 2014; Savery, 2015; Haugaard, 2017). Warga negara memiliki hak yang harus dijamin oleh otoritas politik di negara yang bersangkutan (Savery, 2015). Warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

Masalah kemiskinan harus segera diselesaikan agar ketentraman dan kesejahteraan dapat tercapai. Piagam hak asasi manusia internasional telah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu permasalahan yang bertentangan dengan konsep kewarganegaraan (Kingston, 2014). Kemiskinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menimbulkan

ketidakadilan antara individu satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan baik kemiskinan unidimensi maupun kemiskinan multidimensi. Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan harus memiliki instrumen pengukuran kemiskinan yang jelas dan komprehensif, sehingga dalam kajian ini dibahas tentang pengentasan kemiskinan multidimensi melalui mekanisme kewarganegaraan serta instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode Delphi untuk memberikan penilaian terhadap hal-hal yang kompleks karena informasi yang kurang memadai. Metode Delphi digunakan karena pengetahuan yang tidak lengkap, kurangnya kesepakatan, ketidakpastian atau kurangnya bukti, serta kurangnya data historis atau teknis yang sesuai. Metode Delphi digunakan untuk mengumpulkan dan memilih pengetahuan dari ahli, mencapai konsensus, mengeksplorasi ide yang andal dan kreatif, serta menghasilkan informasi yang sesuai untuk pengambilan keputusan (Sobaih, Ritchie, dan Jones, 2012). Metode Delphi memiliki empat karakteristik utama yaitu anonimitas antar peserta, iterasi dengan umpan balik, agregasi statistik, serta adanya masukan ahli (Trevelyan dan Robinson, 2015; Skinner, dkk., 2015; Self, Gordon, dan Jolly, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner untuk mengetahui pendapat kelompok tentang permasalahan yang dibahas.

Metode Delphi dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, distilasi, dan utilisasi. Tahap eksplorasi dilakukan dengan memperjelas pertanyaan penelitian, uji coba untuk menghilangkan hambatan metodologis potensial, mengidentifikasi dan memvalidasi panelis potensial, serta memilih panelis ahli. Penentuan panelis pada tahap ini merujuk pada kriteria pakar sebagai individu yang terinformasi, spesialis, dan memiliki pengetahuan tentang subjek tertentu. Tahap distilasi dilakukan dengan memilih kodifikasi secara kuantitatif menggunakan skala Likert (Self, Gordon, dan Jolly, 2019; Holey, dkk., 2007). Penilaian secara kuantitatif bertujuan untuk mengurangi subjektivitas sekaligus menetapkan konsensus

dan stabilitas dalam proses Delphi. Tahap utilisasi dilakukan dengan membuat simpulan akhir dan pernyataan konsensus yang harus dibagikan kepada semua panelis untuk dikomentari kemudian disebarluaskan kepada publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengentasan Kemiskinan Multidimensi melalui Mekanisme Kewarganegaraan

Mekanisme kewarganegaraan dipengaruhi oleh kebijakan negara yang mengarah pada program perlindungan sosial, pemberdayaan, penghidupan, dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Kebijakan publik yang menekankan pada mekanisme kewarganegaraan dapat menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, dan perawatan. Program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah harus dirancang dengan mekanisme kewarganegaraan sebagai kriteria kelayakan (Haile, Seyoum, & Azmeraw, 2021). Instrumen dalam mekanisme kewarganegaraan sangat dibutuhkan agar program-program perlindungan sosial tepat sasaran pada target yang diharapkan (Santos dan Villatoro, 2018; Workneh dan Eshete, 2021; Shah dan Debnath, 2022). Perumusan instrumen untuk kebijakan afirmasi merupakan spesialisasi dari konsep *inklusi sosial policy* (Gururaj, dkk., 2021). Kebijakan negara sangat mempengaruhi mekanisme kewarganegaraan yang dijadikan sebagai parameter dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi.

Pengentasan kemiskinan multidimensi perlu didukung oleh kebijakan negara pada berbagai bidang kehidupan. Instrumen pengukuran tingkat kemiskinan melalui mekanisme kewarganegaraan didasarkan pada hasil telaah deprivasi (Singh dan Sarkar, 2015). Kelangsungan hidup anak menjadi indikator sosial kualitas hidup masyarakat miskin karena cukup responsif terhadap kondisi sosial ekonomi (Cockburn dan Kabubo-Mariara, 2010). Penyebab rendahnya pendapatan masyarakat salah satunya yaitu kurangnya investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik (Mehrotra, Vandermoortele, dan Delamonica, 2000). Penurunan pendapatan agregat disebabkan oleh adanya krisis ekonomi makro. Kebijakan negara pada bidang pendidikan dan kesehatan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat

yang berdampak pada kesejahteraan sosial.

Kebijakan negara dalam perspektif kewarganegaraan perlu diarahkan pada kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan tentang kesetaraan akan berdampak pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, veteran perang, dan korban kekerasan (Mukhopadhyay dan Singh, 2007; Castillejo, 2008). Disabilitas sangat terasosiasi dengan kemiskinan karena sebagian besar dari penyandang disabilitas ditemukan miskin secara multidimensi (Brucker, dkk., 2015). Penyandang disabilitas lebih cenderung miskin pendapatan atau secara materiil dibandingkan non disabilitas (Brault, 2012; Cooper, O'Hara, dan Zovistoski, 2011). Penyandang disabilitas menghadapi tingkat kemiskinan multidimensi dan intensitas kemiskinan multidimensi lebih tinggi. Keluarga penyandang disabilitas merupakan salah satu variabel yang berpengaruh kuat terhadap kemiskinan multidimensi di perkotaan dan pedesaan (Salam, Pratomo, dan Saputra, 2020). Penyandang disabilitas secara signifikan berkaitan dengan deprivasi dalam berbagai dimensi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik.

Implementasi mekanisme kewarganegaraan dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi dipengaruhi oleh norma internasional, realitas ekonomi, masyarakat sipil, institusi liberal universal, dan kekhasan nasional. Mekanisme kewarganegaraan dapat melindungi penduduk migran melalui pemberian hak-hak dan jaminan hukum (Joppke, 2012). Kelompok migran mengalami deprivasi multidimensi yang lebih intens dibandingkan warga negara reguler seperti kerentanan dalam hal pendidikan, akses kesehatan, perumahan, dan gizi (Gabel dan Zhang, 2017). Kelompok migran memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental yang dapat menimbulkan kekerasan (Bulla, dkk., 2017). Kelompok migran harus memperoleh akses yang sama terhadap perlindungan sosial dan layanan publik (Chen dan Tang, 2023; Amfo, dkk., 2023). Pemerintah harus merancang berbagai proyek dan program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan kelompok rentan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pradhan, Kandapan, dan Pradhan, 2022). Implementasi mekanisme kewarganegaraan sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi warga negara migran dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi.

### Instrumen Pengukuran Efektivitas Mekanisme Kewarganegaraan dalam Pengentasan Kemiskinan Multidimensi

Instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi didasarkan pada 3 indikator yang dijabarkan dalam 29 butir sub indikator. Indikator efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi yaitu: (a) pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara, (b) kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas, kesetaraan dan keadilan gender, serta kelompok rentan lainnya, (c) perlindungan warga negara migran (Suwanda, 2024). Indikator pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara terbagi atas 7 butir sub indikator. Indikator kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas, kesetaraan dan keadilan gender, serta kelompok rentan lainnya terbagi atas 14 butir sub indikator. Indikator perlindungan warga negara migran terbagi atas 8 butir sub indikator. Indikator pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara dijabarkan dalam Tabel 1.

Indikator pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara memiliki *grand mean* mencapai 4,06 dan meningkat 0,08 poin pada distilasi tahap ketiga menjadi 4,14. *Grand mean of standard deviation* mengalami penurunan sebesar 0,05 dari 0,593 menjadi 0,543 pada distilasi tahap ketiga. Indikator ini memiliki 7 butir sub indikator yaitu: (a) realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara, (b) pengakuan hak-hak kewarganegaraan berdasarkan identitas hukum, (c) perlindungan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial, (d) integrasi sistem dan data identitas hukum kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi pengentasan kemiskinan, (e) perlindungan data pribadi penduduk miskin, (f) adopsi teknologi, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses layanan berbasis identitas hukum, serta (g) perlindungan hukum untuk warga negara. Hasil konsensus mengeliminasi 1 butir sub indikator yang memiliki standar deviasi di atas rata-rata yaitu perlindungan data pribadi penduduk miskin, sehingga menjadi 6 butir sub indikator. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara menjadi sub indikator utama dalam indikator ini. Indikator kebijakan afirmasi untuk warga

**Tabel 1** Indikator Pemenuhan Identitas Hukum Kewarganegaraan sebagai Kunci Akses Sumber Daya Negara

| Konsep Mekanisme Kewarganegaraan   | No. | Eksplorasi Instrumen Pengukuran   | Round 1 |       | Round 2 |       | Round 3 |       | Rank |
|--|-----|---|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------|
|  |     |   | Mean    | SD    | Mean    | SD    | Mean    | SD    |      |
| Pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara | 1.  | Realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara  | 4,89    | 0,333 | 4,78    | 0,441 | 4,78    | 0,441 | 1    |
|  | 2.  | Pengakuan hak-hak kewarganegaraan berdasarkan identitas hukum   | 4,22    | 0,441 | 4,33    | 0,500 | 4,33    | 0,500 | 4    |
|  | 3.  | Perlindungan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial  | 4,11    | 0,333 | 4,22    | 0,441 | 4,22    | 0,441 | 6    |
|  | 4.  | Integrasi sistem dan data identitas hukum kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi pengentasan kemiskinan | 4,22    | 0,972 | 4,56    | 0,527 | 4,56    | 0,527 | 2    |
|  | 5.  | Perlindungan data pribadi penduduk miskin   | 2,44    | 1,130 | 2,33    | 0,866 | 2,33    | 0,866 |      |
|  | 6.  | Adopsi teknologi, keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan berbasis identitas hukum                  | 4,33    | 0,500 | 4,44    | 0,527 | 4,44    | 0,527 | 3    |
|  | 7.  | Perlindungan hukum untuk warga negara   | 4,22    | 0,441 | 4,33    | 0,500 | 4,33    | 0,500 | 4    |
| Nilai Rerata Konsep  |     |   | 4,06    | 0,593 | 4,14    | 0,543 | 4,14    | 0,543 |      |

negara anak, lansia, penyandang disabilitas, kesetaraan dan keadilan gender, serta kelompok rentan lainnya dijabarkan dalam Tabel 2.

Indikator kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas,

kesetaraan dan keadilan gender, serta kelompok rentan lainnya memiliki *grand mean* mencapai 3,4 dan meningkat 0,012 poin pada distilasi tahap ketiga menjadi 3,52. *Grand mean of standard deviation* mengalami penurunan

**Tabel 2** Indikator Kebijakan Afirmasi untuk Warga Negara Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas, Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Kelompok Rentan Lainnya.

| Konsep Mekanisme Kewarganegaraan  | No. | Round 1   | Round 2     |              | Round 3     |              | Rank |
|---|-----|---|-------------|--------------|-------------|--------------|------|
|   |     | Eksplorasi Instrumen Pengukuran   | Mean        | SD           | Mean        | SD           |      |
| Kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas, kesetaraan dan keadilan gender, serta kelompok rentan lainnya | 1   | Indeks afirmasi kemiskinan multidimensi anak  | 2,44        | 1,014        | 2,33        | 1,118        |      |
|   | 2   | Indeks afirmasi kemiskinan multidimensi lansia  | 2,11        | 1,167        | 2,11        | 0,928        |      |
|   | 3   | Indeks afirmasi kemiskinan multidimensi penyandang disabilitas  | 2,56        | 1,014        | 2,44        | 1,014        |      |
|   | 4   | Indeks afirmasi kemiskinan multidimensi perempuan   | 2,44        | 1,130        | 2,22        | 0,972        |      |
|   | 5   | Kemiskinan multidimensi Geds (anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya) | 4,22        | 0,667        | 4,44        | 0,527        | 3    |
|   | 6   | Kesetaraan dan keadilan gender  | 4,56        | 0,527        | 4,67        | 0,500        | 1    |
|   | 7   | Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat kelompok rentan   | 4,00        | 0,707        | 4,11        | 0,601        | 7    |
|   | 8   | Inklusivitas kebijakan  | 4,78        | 0,441        | 4,67        | 0,500        | 1    |
|   | 9   | Distribusi fiskal afirmasi  | 3,89        | 0,601        | 4,33        | 0,500        | 4    |
|   | 10  | Keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan afirmasi  | 3,89        | 0,601        | 4,22        | 0,667        | 5    |
|   | 11  | Peningkatan kesejahteraan umum  | 2,44        | 1,333        | 2,78        | 1,394        |      |
|   | 12  | Adopsi teknologi untuk kebijakan afirmasi   | 2,33        | 0,707        | 2,78        | 0,667        | 9    |
|   | 13  | Penghapusan stigma dan diskriminasi kelompok rentan   | 4,00        | 0,500        | 3,89        | 0,601        | 8    |
|   | 14  | Aksesibilitas layanan khusus  | 3,89        | 0,601        | 4,22        | 0,441        | 5    |
| <b>Nilai Rerata Konsep</b>  |     |   | <b>3,40</b> | <b>0,786</b> | <b>3,52</b> | <b>0,745</b> |      |

sebesar 0,041 dari 0,786 menjadi 0,745 pada distilasi tahap ketiga. Indikator ini memiliki 14 butir sub indikator yaitu: (a) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi anak, (b) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi lansia, (c) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi penyandang disabilitas, (d) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi perempuan, (e) kemiskinan multidimensi anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, (f) kesetaraan dan keadilan gender, (g) tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat kelompok rentan, (h) inklusivitas kebijakan, (i) distribusi fiskal afirmasi, (j) keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan afirmasi, (k) peningkatan kesejahteraan umum, (l) adopsi teknologi untuk kebijakan afirmasi, (m) penghapusan stigma dan diskriminasi kelompok

rentan, serta (n) aksesibilitas layanan khusus.

Hasil konsensus mengeliminasi 5 sub instrumen yang memiliki standar deviasi di atas rata-rata yaitu indeks afirmasi kemiskinan multidimensi anak, indeks afirmasi kemiskinan multidimensi lansia, indeks afirmasi kemiskinan multidimensi penyandang disabilitas, indeks afirmasi kemiskinan multidimensi perempuan, dan peningkatan kesejahteraan umum. Indikator kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas, kesetaraan dan keadilan gender, serta kelompok rentan lainnya pada akhirnya hanya memiliki 9 sub indikator. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender serta inklusivitas kebijakan menjadi sub indikator utama dalam indikator ini. Indikator perlindungan warga negara migran dijabarkan dalam Tabel 3

**Tabel 3** Indikator Perlindungan Warga Negara Migran

| Konsep Mekanisme Kewarganegaraan | No. | Round 1  |            | Round 2 |       | Round 3 |       | Rank |
|----------------------------------|-----|--|------------|---------|-------|---------|-------|------|
|                                  |     | Eksplorasi Instrumen   | Pengukuran | Mean    | SD    | Mean    | SD    |      |
| Perlindungan warga negara migran | 1   | Kemiskinan multidimensi warga negara migran  |            | 4,22    | 0,441 | 4,33    | 0,500 | 3    |
|                                  | 2   | Realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara migran                                |            | 4,00    | 0,500 | 4,89    | 0,333 | 1    |
|                                  | 3   | Pengakuan hak-hak kewarganegaraan warga negara migran di negara tujuan dan negara asal |            | 4,44    | 0,527 | 4,44    | 0,527 | 2    |
|                                  | 4   | Perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja   |            | 4,44    | 0,527 | 4,22    | 0,441 | 6    |
|                                  | 5   | Perlindungan hukum warga negara migran   |            | 4,56    | 0,527 | 4,33    | 0,500 | 3    |
|                                  | 6   | Pemenuhan legalitas ketenagakerjaan migran   |            | 4,44    | 0,527 | 4,33    | 0,500 | 3    |
|                                  | 7   | Perlindungan sosial, ekonomi, psikologis warga negara migran (saat dan pasca bekerja)  |            | 3,11    | 1,269 | 3,22    | 1,093 |      |
|                                  | 8   | Keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan ketenagakerjaan migran               |            | 4,00    | 0,500 | 4,00    | 0,500 | 7    |
| Nilai rata-rata konsep           |     |  |            | 4,15    | 0,602 | 4,22    | 0,549 |      |

Indikator perlindungan warga negara migran memiliki *grand mean* mencapai 4,15 dan meningkat 0,07 poin pada distilasi tahap ketiga menjadi 4,22. *Grand mean of standard deviation* mengalami penurunan sebesar 0,053 dari 0,602 menjadi 0,549 pada distilasi tahap ketiga. Indikator ini memiliki 8 butir sub indikator yaitu: (a) kemiskinan multidimensi warga negara migran, (b) realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara migran, (c) pengakuan hak-hak kewarganegaraan warga negara migran di negara tujuan dan negara asal, (d) perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja, (e) perlindungan hukum warga negara migran, (f) pemenuhan legalitas ketenagakerjaan migran, (g) perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis warga negara migran ketika bekerja dan pasca bekerja, serta (h) keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan ketenagakerjaan migran. Hasil konsensus mengeliminasi 1 sub indikator yang memiliki standar deviasi di atas rata-rata yaitu perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis warga negara migran ketika bekerja dan pasca bekerja. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara migran menjadi sub indikator utama dalam indikator ini.

Instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dapat digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi. Sub indikator pengukuran yang menjadi kriteria utama dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi yaitu sebanyak 4 butir yang meliputi realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara, kesetaraan dan keadilan gender, inklusivitas kebijakan, serta realisasi pemenuhan identitas hukum warga negara migran. Sub indikator pengukuran yang belum mencapai konsensus yaitu sebanyak 7 butir yang meliputi: (a) perlindungan data pribadi penduduk miskin, (b) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi anak, (c) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi lansia, (d) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi penyandang disabilitas, (e) indeks afirmasi kemiskinan multidimensi perempuan, (f) peningkatan kesejahteraan umum, serta (g) perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis warga negara migran ketika bekerja dan pasca bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 22 butir sub indikator atau sebesar 75,8% dari total keseluruhan sub indikator dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengentasan

kemiskinan multidimensi melalui mekanisme kewarganegaraan.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan identitas hukum kewarganegaraan bagi seluruh warga negaranya agar dapat mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki. Mekanisme kewarganegaraan berkaitan dengan keyakinan dan nilai-nilai yang diharapkan oleh warga negara (Joppke, 2012). Kewarganegaraan menjadi sarana untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi, dan politik (Blitz dan Lynch, 2009; Suparno, Juri, dan Relita, 2018). Status hukum saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah sosial yang mempengaruhi populasi dunia tanpa adanya kewarganegaraan secara *de jure* (Brysk, 2002). Keadaan tanpa kewarganegaraan secara *de facto* dapat membatasi perlindungan hak asasi manusia serta dapat menurunkan kualitas mekanisme politik untuk memastikan akuntabilitas pemegang kekuasaan (Sumargo dan Simanjuntak, 2019). Cita-cita kewarganegaraan belum tercapai karena keterbatasan *stateless de facto* dan *stateless de jure* untuk memperoleh perlindungan negara (Kingston, 2014). Kewarganegaraan tidak hanya menentukan status formal keanggotaan dalam suatu negara, tetapi juga hak-hak dan identitas individu dalam masyarakat yang bersangkutan.

## SIMPULAN

Pengentasan kemiskinan multidimensi dapat dilakukan melalui mekanisme kewarganegaraan. Mekanisme kewarganegaraan dapat menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Mekanisme kewarganegaraan dalam upaya pengentasan kemiskinan multidimensi dipengaruhi oleh norma internasional, realitas ekonomi, masyarakat sipil, institusi liberal universal, dan kekhasan nasional. Instrumen pengukuran efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi didasarkan pada 3 indikator yang dijabarkan dalam 22 butir sub indikator. Indikator efektivitas mekanisme kewarganegaraan dalam pengentasan kemiskinan multidimensi yaitu pemenuhan identitas hukum kewarganegaraan sebagai kunci akses sumber daya negara, perlindungan warga negara migran, serta kebijakan afirmasi untuk warga negara anak, lansia, penyandang disabilitas, kesetaraan, keadilan gender, dan kelompok rentan lainnya.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7), 476-487.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59(1), 251-274
- Amfo, B., Aidoo, R., Mensah, J. O., & Maanikuu, P. M. I. (2023). Linkage Between Working Conditions and Wellbeing: Insight from Migrant and Native Farmhands on Ghana's Cocoa Farms. *Heliyon*, 9(2), 151-163.
- Anand, S., & Sen, A. (1997). *Concepts of Human Development and Poverty: A Multidimensional Perspective*. United Nations: United Nations Development Programme, Poverty and Human Development.
- Blitz, B. K., & Lynch. M. (2009). *Statelessness and the Benefits of Citizenship: A Comparative Study*. United Kingdom: Oxford Brookes University.
- Booth, C. (1902). *Life and Labour of the People in London*. London: Macmillan and Co. Ltd.
- Brault, M. W. (2012). *Americans with Disabilities: 2010*. Washington: U. S. Census Bureau.
- Brucker, D. L., Mitra, S., Chaitoo, N., & Mauro, J. (2015). More Likely to Be Poor Whatever the Measure: Working-Age Persons with Disabilities in the United States. *Social Science Quarterly*, 96(1), 273-296.
- Brysk, A. (2002). *Globalization and Human Rights*. California: University of California.
- Bulla, J., Hoffmann, K., Querengasser, J., & Ross, T. (2017). Socioeconomic Disadvantage and Schizophrenia in Migrants Under Mental Health Detention Orders. *International Journal of Social Psychiatry*, 63(6), 550-558.
- Castillejo, C. (2008). *Strengthening Women's Citizenship in the Context of State Building: The Experience of Sierra Leone*. Madrid: Fundacion para las Relaciones Internacionales el Dialogo Exterior.
- Cerio, C. T., Calalo, F. C., Marasigan, S. B., & Dizon, J. T. (2019). Using Counting and Participatory Approaches in Multidimensional Poverty Assessment: The Case of Upland Farming Households in the Philippines. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 166-197.
- Chamber, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Harlow: Prentice Hall.
- Chamber, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204.
- Chamber, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology.
- Chen, Y., & Tang, Z. (2023). A Study of Multidimensional and Persistent Poverty Among Migrant Workers: Evidence from China's CFPS 2014-2020. *Sustainability (Switzerland)*, 15(10), 108-121.
- Chowdhury, T. A., & Mukhopadhaya, P. (2014). Multidimensional Poverty Approach and Development of Poverty Indicators: The Case of Bangladesh. *Contemporary South Asia*, 22(3), 268-289.
- Cockburn, J., & Kabubo-Mariara, J. (2010). *Child Welfare in Developing Countries*. United States: Springer.
- Cooper, E., O'Hara, A., & Zovistoski, A. (2011). *2010 Priced Out: The Housing Crisis for People with Disabilities*. Boston: Technical Assistance Collaborative Inc.
- Deutsch, K. W. (1986). State Functions and the Future of the State. *International Political Science Review*, 7(2), 209-222.
- Gabel, S. G., & Zhang, Y. (2017). Benefits of Multidimensional Measures of Child Well Being in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(11), 111-129.
- Glennester, H. (2002). United States Poverty Studies and Poverty Measurement: The Past Twenty Five Years. *Social Service Review*, 76(1), 324-344.
- Gururaj, S., Somers, P., Fry, J., Watson, D., Cicero, F., Morosini, M., & Zamora, J. (2021). Affirmative Action Policy: Inclusion, Exclusion, and the Global Public Good. *Policy Futures in Education*, 19(1), 63-83. <https://doi.org/10.1177/1478210320940139>
- Haile, D., Seyoum, A., & Azmeraw, A. (2021). Does Building the Resilience of Rural Households Reduce Multidimensional Poverty? Analysis of Panel Data in Ethiopia. *Scientific African*, 12(1), 788-801.
- Haugaard, M. (2017). What is Authority? *Journal of Classical Sociology*, 18(2), 104-132.
- Hlasny, V., Asadullah, M. N., & Sabra, A. (2022). The Adoption of the Multidimensional Poverty Index in Developing Asia: Implications for Social Program Targeting

- and Inequality Reduction. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(3), 185-195.
- Holey, E. A., Feeley, J. L., Dixon, J., & Whittaker, V. J. (2007). An Exploration of the Use of Simple Statistics to Measure Consensus and Stability in Delphi Studies. *BMC Medical Research Methodology*, 7(1), 52-65.
- Joppke, C. (2012) Citizenship and Immigration. *Ethnicities*, 12(6), 844-863. <https://doi.org/10.1177/1468796812449706>
- Kabeer, N. (2015). Gender, Poverty, and Inequality: A Brief History of Feminist Contributions in the Field of International Development. *Gender & Development*, 23(2), 189-205.
- Kingston, L. N. (2014). Statelessness as a Lack of Functioning Citizenship. *Tilburg Law Review*, 19(1-2), 127-135.
- Mehrotra, S., Vandermoortele, J., & Delamonica, E. (2000). *Basic Services for All? Public Spending and Social Dimensions of Poverty*. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Mukhopadhyay, M., & Singh, N. (2007). *Gender Justice, Citizenship and Development*. New Delhi: Zubaan.
- Narayan, D., & Petesch, P. (2016). *Voices of the Poor from Many Lands*. Oxford: Oxford University Press.
- Narayan, D., Patel, R., Schafft, K., Rademacher, A., & Skoch-Schulte, S. (2000). *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* Oxford: Oxford University Press.
- Pierson, C. (1996). *Modern State*. London: Routledge.
- Pradhan, I., Kandapan, B., & Pradhan, J. (2022). Uneven Burden of Multidimensional Poverty in India: A Caste Based Analysis. *Plos One*, 17(7), 271-286.
- Rowntree, B. S. (1908). *Poverty a Study of Town Life*. London: Macmillan and Co.ltd
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2020). Socio-Economic Determinants of Multidimensional Poverty in the Rural and Urban Areas of East Java. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 1445-1449.
- Santos, M. E., & Villatoro, P. (2018). A Multidimensional Poverty Index for Latin America. *Review of Income and Wealth*, 64(1), 52-82.
- Savery, D. (2015). Power to the People: Freedom as Non-Domination, Disabling Constraints and the Eyeball Test. *Journal of Political Power*, 8(3), 363-384.
- Self, T., Gordon, S., & Jolly, P. (2019). Talent Management: A Delphi Study of Assessing and Developing Gen Z Hospitality Leaders. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 31(10), 4126-4149.
- Sen, A. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to Measurement. *Econometrica*, 44(2), 219-228.
- Sen, A. (1979). *Equality of What? The Tanner Lecture on Human Values*. United States: Stanford University
- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines*. Oxford: Clarendon Press.
- Shah, S., & Debnath, N. (2022). Determinants of Multidimensional Poverty in Rural Tripura, India. *Journal of Quantitative Economics*, 20(1), 69-95.
- Singh, R., & Sarkar, S. (2015). Children's Experience of Multidimensional Deprivation: Relationship with Household Monetary Poverty. *The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier*, 56(1), 43-56.
- Skinner, R., Nelson, R., Chin, W., & Land, L. (2015). The Delphi Method Research Strategy in Studies of Information Systems. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(2), 370-382.
- Sobaih, A. E., Ritchie, C., & Jones, E. (2012). Consulting the Oracle? *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 24(6), 886-906.
- Streeten, P. (1981). *First Things First Meeting Basic Human Needs in the Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160-172.
- Suparno, Juri, & Relita, D. T. (2018). Implementasi Hak Warga Negara melalui Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender Program Keluarga Harapan terhadap Motivasi Belajar Anak Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Sintang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 196-206.
- Suwanda, R. P. (2020). *Model Indeks Kemiskinan*

- Inklusif*. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Suwanda, R. P. (2024). *Distinctive State Mechanisms in Multidimensional Poverty Alleviation*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom*. Penguin: Harmondsworth.
- Trevelyan, E. G., & Robinson, P. N. (2015). Delphi Methodology in Health Research: How to Do It? *European Journal of Integrative Medicine*, 7(4), 423-428.
- Wagle, U. R. (2008). Multidimensional Poverty: An Alternative Measurement Approach for the United States? *Social Science Research*, 37(2), 559-580.
- Weber, M. (1946). *Politics As a Vocation*. Oxford: Oxford University Press.
- Workneh, M. A., & Eshete, Z. S. (2021). Household Level Non-Monetary Poverty in Ethiopia and Its Driving Factors: A Multidimensional Approach with Panel Estimation. *Social Indicators Research*, 154(1), 145-168.